

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB  
KERUSAKAN BARANG DALAM OJEK KOPI**

(Studi Kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung  
Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syari'ah

Oleh:

**MOHAMAD FACHTRIGO NOPRIANSYAH**

**NPM. 1621030322**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H / 2021M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBEBANAN TANGGUNG  
JAWAB KERUSAKAN BARANG DALAM OJEK KOPI**

(Studi Kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung  
Barat)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) Dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah**

**Oleh:**

**MOHAMAD FACHTRIGO NOPRIANSYAH**

**NPM. 1621030322**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Pembimbing I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H / 2021M**

## ABSTRAK

Saat ini kita bisa melihat banyak sekali orang mengojek menggunakan sepeda motor yang bagus. Mulai dari yang bebek, matic, hingga motor yang biasanya digunakan untuk balapan. Namun, peranan ojek kopi yang menggunakan motor yang sederhana tetap dibutuhkan untuk media transportasi angkut barang dari lahan perkebunan di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Kondisi lahan perkebunan yang sangat jauh dari jalan raya menjadikan akses menuju perkebunan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Kondisi ini yang menjadi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mendapat rezeki dengan menawarkan jasa ojek kopi. Namun, dalam praktik ojek kopi ini tentunya tidak selalu berjalan dengan baik atau lancar, terdapat kendala yang dijumpai, salah satunya ialah kecelakaan yang dialami oleh satu driver ojek kopi yang mengakibatkan patah kaki, akan tetapi dari kejadian ini pemilik kebun kopi tetap saja ingin meminta pertanggung jawaban atau ganti rugi terhadap kopi-kopi yang rusak karena kecelakaan tersebut. Dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik dan perlu membahas tentang hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam ojek kopi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat, agar pihak yang terkait maupun tidak memahami bagaimana hukum Islam tentang tanggung jawab kerusakan barang dalam ojek kopi tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan, Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Analitis. Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh dari data *primer*, dan *skunder*. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik tanggung jawab atau ganti rugi yang terjadi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat tidak diperbolehkan dalam hukum Islam sebab permintaan ganti rugi atau tanggung jawab yang diminta oleh pemilik kopi melampaui batas hak miliknya, hal tersebut diperkuat dalam surat Asy-Syura ayat 42, dan penetapan tanggung jawab atau ganti rugi bagi tenaga kerja seharusnya memperhatikan sebab dan batas yang telah ditetapkan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam tanggung jawab lebih terwujud dan sesuai ketentuan hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Fachtrigo Nopriansyah  
NPM : 1621030322  
Jurusan/Prodi : Muamalah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi di Purawiwitan, Kecamatan Kebun, Kabupaten Tebu Lampung Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung,  
Penulis,



Mohamad Fachtrigo Nopriansyah  
NPM: 1621030322





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG  
JAWAB KERUSAKAN BARANG DALAM OJEK KOPI**  
(Studi Kasus di Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu,  
Kabupaten Lampung Barat)

Nama : **Mohamad Fachtrigo Nopriansyah**

NPM : **1621030322**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Muamalah**

**MENYETUJUI**

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP.196908081993032002**

**Pembimbing II**

**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**  
**NIP.**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TANGGUNG JAWAB KERUSAKAN BARANG DALAM OJEK KOPI** (Studi Kasus di Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat)" disusun oleh **Mohamad Fachtrigo Nopriansyah Npm 1621030322 Jurusan Muamalah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 10 Februari 2021

**Tim Penguji**

**Ketua**

**: Khoirudin, M.S.I.**

(.....)

**Sekretaris**

**: Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.**

(.....)

**Penguji I**

**: Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.**

(.....)

**Penguji II**

**: Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

(.....)

**Penguji III**

**: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I,**

(.....)



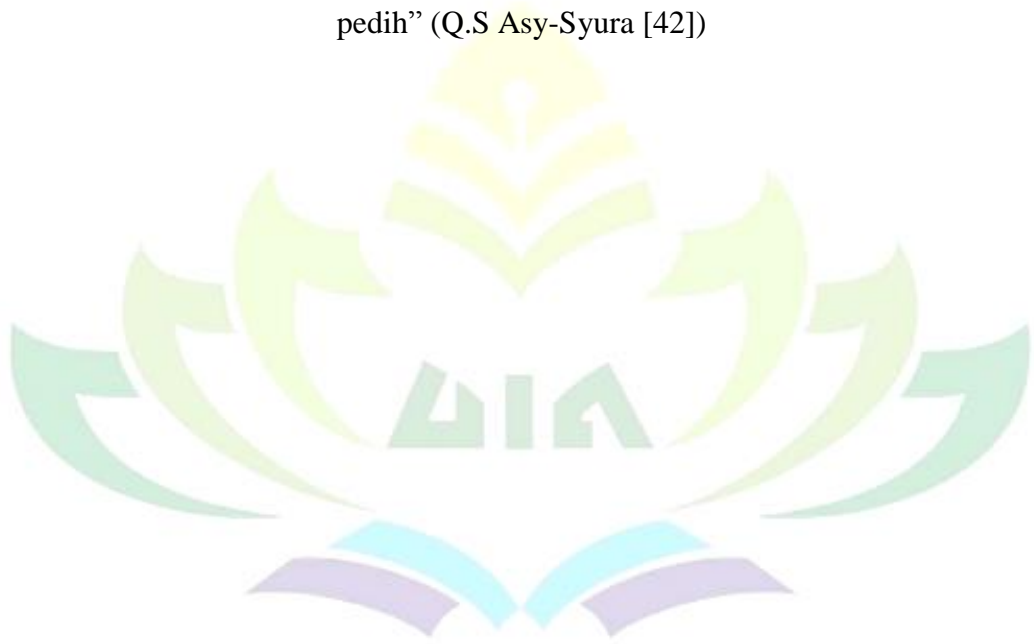
**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Drs. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ  
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih” (Q.S Asy-Syura [42])



## **PERSEMBAHAN**

Dengan ketulusan dan kebanggan, Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Alm.Ayah Fahrudin dan Ibu Sunariah atas doa, kasih sayang, serta dukungan dan motivasi untuk anak-anaknya dalam meraih dan menggapai cita-cita.
2. Adik dan keponakanku tercinta, adik Ayu Julianda dan keponakanku Nabila dan Arief Dwi Utama yang selalu mendukungku dan telah menjadi penyemangat untukku agar terus bersemangat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Syariah, Khususnya Muamalah kelas E angkatan 2016
4. Para dosen pembimbing, Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir di perkuliahan
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Purawiwitan, Kabupaten Lampung Barat provinsi Lampung pada tanggal 13 November 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Terlahir dari pasangan Alm.Fahrudin dan Sunariah dan memiliki satu saudara kandung Ayu Julianda.

Pendidikan penulis ditempuh di TK Aisyiyah Bustanul Athfal lulus pada tahun 2004 , melanjutkan SD di SDN 2 Purajaya lulus pada tahun 2010, SMPN 1 Kebun Tebu lulus pada tahun 2013, SMAN 1 Kebun Tebu lulus pada tahun 2016, melanjutkan di Universitas Islam Negeri Intan Lampung, lulus pada tahun 2020. Penulis mengambil jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Saat duduk dibangku sekolah dasar sampai dengan SMA pernah aktif dalam organisasi, yaitu OSIS, PMR, dan Saka Bahyangkara.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan kasih sayang dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi di Purawiwitan, Kecamatan Kebun, Kabupaten Tebu Lampung Barat” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa *istiqomah* dalam menegakkan risalah Islam dimuka bumi ini dan mengharapkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menghaturkan banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimbah ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan Muamalah. Serta Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
6. Para pegawai perpustakaan pusat UIN Raden Intan maupun perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan
7. Teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu jurusan Muamalah angkatan 2016, khususnya muamalah kelas E dan teman-teman KKN 73 Desa Sidomukti Kecamatan Sekampung, terima kasih atas kebersamaan dan motivasinya.
8. Teman terbaikku Eko Bahktiar, Ahmad Didik Nurhuda, Denny Ferian, Muhamad Iqbal, dan Eko Fernando yang selalu memberikan doa, dukungan, saran dan nasehatnya. Dan terima kasih sudah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater kutercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Semoga bantuan dan segala yang telah diberikan dari semua pihak mendapat pahala dan balasan dari Allah Swt. Akhirnya, Semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya.  
*Aamiin Yaa Rabbal'alam.*

Bandar Lampung, 28 Juli 2020

Mohamad Fachtrigo Nopriansyah  
NPM.1621030322



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	5
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Signifikasi Penelitian .....	6
H. Metode Penelitian .....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ijarah</i> .....	12
B. Bisnis Jasa Layanan Ojek Kopi .....	30
C. Ganti Rugi.....	35
D. Tanggung Jawab .....	51
E. Tinjauan Pustaka.....	58

### BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Purawiwitan, Kecamatan Kebu Tebu, Kabupaten Lampung Barat .....	62
B. Praktik Pembebanan Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi .....	68

#### **BAB IV LAPORAN PENELITIAN**

A. Praktik Tanggung Jawab Kerusakan Barang Dalam Ojek Kopi.....	74
B. Hukum Islam Tentang Praktik Tanggung Jawab Kerusakan Dalam Ojek Kopi.....	75

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi.....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Research
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Plagiat





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Daftar Tabel Nama Peratin Purawiwitan.....	63
2. Daftar Tabel Nama Pemangku di Pekon Purawiwitan.....	64
3. Daftar Tabel Tingkat Pendidikan Pekon Purawiwitan.....	65
4. Daftar Tabel Mata Pencaharian Pekon Purawiwitan.....	65
5. Daftar Tabel Data Kepemilikan Ternak .....	66
6. Daftar Tabel Sarana dan Prasarana Pekon Purawiwitan .....	66



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis mengadakan membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul. Judul merupakan kerangka dalam bertindak apa lagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari salah penafsiran para pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah di dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi di Desa Purawiwitan Kecamatan, Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat)”**. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan adalah sebagai berikut:

**Hukum Islam** merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>1</sup> Maksud dari Hukum Islam disini adalah Hukum Bisnis Syariah (Fiqh Muamalah).

**Tanggung Jawab** adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

---

<sup>1</sup> Amir Syafuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5

**Ojek** dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau barang. Sedangkan adalah ojek kopi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah seseorang yang bertugas mengendarai transportasi (motor) guna mengangkut barang, dengan mengambil barang dari lahan petani atau dari gudang kopi.

Transportasi atau pengangkutan barang merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Secara umum, di Indonesia jenis transportasi ada tiga jenis yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dalam hal ini, penelitian mengacu pada transportasi darat (motor) jasa layanan transportasi ojek kopi adalah layanan transportasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa.

Berdasarkan beberapa penegasan, maka yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembebanan Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi Kasus di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Study Kasus di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat) ini yaitu:



### 1. Secara Objektif

Ojek kopi sendiri merupakan hal yang selalu ada pada masyarakat Purawiwitan, permasalahan ganti rugi yang timbul dari aktifitas muamalah tersebut perlu dipastikan kejelasan hukumnya agar kelak jika terjadi kasus yang sama masyarakat setempat tidak lagi bingung dalam menghadapinya.

### 2. Secara Subjektif

- a. Tema tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi” menurut penulis sangat perlu dan menarik untuk diteliti dan dikaji.
- b. Masalah yang dibahas dalam proposal ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- c. Selain itu penelitian ini belum pernah di bahas dalam bentuk skripsi, khususnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*).

### C. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang terjadi pada seluruh negara tanpa termasuk Indonesia, telah merubah banyak aspek kehidupan masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu dampak dari globalisasi ini adalah meningkatnya pergerakan atau perpindahan masyarakat dari satu

tempat ke tempat lain dan terjadi dalam waktu yang cepat. Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau dibutuhkan oleh manusia tetapi juga terjadi pada barang dan jasa, seperti kegiatan rutin perpindahan barang melalui ojek.

Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung mengikuti lereng Bukit Barisan, bagian Selatan meruncing dekat dengan sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Secara morfologi wilayah Kabupaten Lampung Barat pada umumnya merupakan daerah berbukit sampai pegunungan.

Letak geografis potensial dalam menghasilkan produk hasil bumi seperti kopi dan lada. Namun, kondisi lahan perkebunan yang sangat jauh dari jalan raya menjadikan akses menuju perkebunan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Kondisi ini yang menjadi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk mendapat rezeki dengan menawarkan jasa ojek kopi.

Tarif yang ditawarkan dari setiap angkutannya sebesar Rp.700 rupiah perkilogram terhadap masing masing pemilik lahan kopi tersebut. Jasa ojek biasa mengangkut kopi sebanyak 2 karung dalam 1kali perjalanan, dari setiap karung berisikan 100 kilogram kopi. Dalam praktinya jasa angkutan ojek kopi tidak selalu berjalan lancar banyak juga kendala yang dihadapi oleh para pemberi jasa, seperti jika terjadi hujan

pada malam hari maka keesokan harinya jalan menuju perkebunan menjadi licin dan mengakibatkan kecelakaan pada pemberi jasa.

Dari latar belakang di atas penulis merasa tertarik dan perlu membahas tentang hukum Islam tentang Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam ojek kopi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat, agar pihak yang terkait maupun tidak memahami bagaimana hukum Islam tentang tanggung jawab kerusakan barang dalam ojek kopi tersebut.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang Pembebanan Tanggung Jawab Kerusakan Barang dalam Ojek Kopi (Studi Kasus di Pekon Desa Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana tanggung jawab kerusakan barang dalam ojek kopi di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab kerusakan barang dalam ojek kopi di Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Tanggung Jawab Kerusakan Barang Dalam Ojek Kopi di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab kerusakan barang dalam ojek kopi di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah *hasanah* ilmu pengetahuan dan pustaka Islam, selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai pembebanan kerusakan barang dalam ojek kopi di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun, Kabupaten Tebu Lampung Barat.

## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>2</sup> Menurut Kartini Kartono, Metode penelitian adalah “cara berfikir dan membuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian”.<sup>3</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok,

---

<sup>2</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.24.

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 1996), h.15.

institusi atau masyarakat.<sup>4</sup> Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Kemudian sifat penelitian ini yaitu bersifat Deskriptif Analitis. Yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah “suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada suatu fenomena tertentu.”<sup>5</sup>

## 3. Data dan Sumber data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>6</sup>

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang di teliti. Data primer dalam studi lapangan di dapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari keluhan jasa ojek dan pengguna jasa ojek di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>4</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h.54.

<sup>5</sup> Kaelan, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115.

#### b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

#### 4. Alat pengumpulan Data

##### a. Metode *Interview*

Menurut Mardalis *Interview* adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui cakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>7</sup> Maka dapat diambil kesimpulan metode *interview* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan *interview* bebas terpimpin, artinya *interview* memberikan kebebasan kepada orang yang di *interview* untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri.

---

<sup>7</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal...* h.64.

## b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, majalah, gambar, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## 5. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, “Populasi adalah keseluruhan objek penelitian”.<sup>8</sup> Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data pada penelitian, populasi yang diambil adalah pihak pemilik kopi dan jasa ojek kopi, adalah 10 orang terdiri dari pemilik kopi yang berjumlah 4 orang dan 6 jasa ojek kopi yang berada di Desa Purawiwitan. Karena ojek kopi dan pemilik kopi terdiri 10 orang maka ini adalah penelitian populasi.

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikemukakan dan diolah secara kualitatif dalam penelitian ini dianalisa deskriptif kualitatif secara bertahap dan berlapis. Analisa bertahap dilakukan sejak awal pengumpulan data sedikit demi sedikit. Analisa berlapis dilakukan setelah keseluruhan data yang diolah secara kualitatif dalam rangka menganalisa apa yang telah ditetapkan dalam rumusan masalah penelitian ini. Sehingga

---

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), h.102.



diperoleh jawaban rumusan masalah tersebut yang dituangkan dalam kesimpulan sebagai bab penutup dalam penelitian ini.



## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Jual Beli Jasa (*Ijarah*)

#### 1. Pengertian *Ijarah*

*Ijarah* secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa Arab ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia yaitu ganti dan upah.<sup>1</sup> Kata "ganti" di sini dimaksudkan merupakan suatu bentuk akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan suatu jalan penggantian. Sedangkan maksud "manfaat" di sini adalah berguna, yaitu suatu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama dalam menggunakannya, barang tersebut tidak akan mengalami perubahan ataupun musnah.<sup>2</sup>

Menurut Musthafa Dib Al-Bugha dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Transaksi Syariah menjelaskan *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya tersebut. Menurut Musthafa untuk definisi di atas digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atau upah atas suatu pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya di

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 144.

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 333.

gunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh di manfaatkan dengan imbalan tertentu. Menurut ulama Malikiyah dan hanabilah mendefinisikan *ijarah* sebagai Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama di atas pada dasarnya terdapat persamaan di antara ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah dalam menjelaskan *ijarah* menurut istilah, terdapat kata manfaat, waktu tertentu, dan imbalan, dalam setiap definisinya. Definisi *ijarah* dan *syara'* adalah akad atas suatu manfaat yang di perbolehkan menurut agama, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya dalam jangka waktu yang telah di ketahui, atau akad atas pekerjaan yang di ketahui, dengan bayaran yang di ketahui.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet-1, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), h.145.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet, Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 228-229.

<sup>5</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h.482.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia memberikan pengertian bahwa *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa di ikuti dengan pemindahan ke pemilikan barang itu sendiri.<sup>6</sup> Menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyatakan bahwa *ijarah* harus di pahami dalam arti luas yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>7</sup>

Demikian pula Rozalinda dalam bukunya Fikih Ekonomi Syariah menyatakan *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.<sup>8</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* merupakan suatu transaksi pemanfaatan suatu barang tertentu yang telah ditentukan waktu penggunaannya serta telah di tentukan pula jumlah suatu imbalan yang akan diberikan sebagai ganti manfaat tersebut. Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka barang harus di kembalikan atau biasa kita sebutdengan sewa-menyewa yaitu suatu perjanjian dengan mana terdapat satu pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kenikmatan dari suatu

---

<sup>6</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunann Fatwa Keuangan Syariah*,(Jakarta: Erlangga, 2014), h.92.

<sup>7</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2002), h. 29.

<sup>8</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.131.

barang kepada pihak lainnya selama waktu tertentu dan dengan pembayaran harga tertentu.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Ijarah

### a. Al-Qur'an

1) QS. Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (QS. Az-Zukhruf [43]:32).<sup>10</sup>

Maksud dari ayat diatas yaitu bahwa Allah SWT, telah membagikan sarana penghidupan bagi para hamba-Nya dalam kehidupan di dunia, karena manusia tidak dapat melakukannya sendiri, Allah SWT, juga telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan lainnya atas sebagian dari yang lain sehingga setiap manusia dapat saling tolong-menolong.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet 7, (Bandung Penerbit Alumni, 1979), h.39.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Diponegoro, 2010), h.491.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.562.



## 2) QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara *ma'ruf*. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah: 233)<sup>12</sup>

Ayat di atas berkaitan dengan *ijarah*, dalam hal ini tentang anjuran memberikan upah atas suatu pekerjaan, yaitu jasa menyusui. Dalam tafsir Ibnu Kasir menjelaskan, apabila

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...h. 37

ayah dan ibu sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka si ayah yang menyusukan anaknya kepada wanita lain harus dengan memberikan upah yang layak.<sup>13</sup>

### 3) QS. Al-Kahfi: 77

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ  
يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ  
شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Maka keduanya berjalan: hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu oleh penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu, maka Khidr menegakkan dinding itu. Musa berkata: “jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu” (QS. Al-Kahfi [18]: 77)<sup>14</sup>

Sama halnya dengan ayat sebelumnya, pada ayat di atas menjelaskan tentang upah-mengupah tentang manfaat suatu jasa pekerjaan. Khidr yang telah menegakkan dinding rumah, dapat mengambil upah atas jasanya tersebut

<sup>13</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 392.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...h. 290.

## b. Al-Hadis

إِعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ حَبِغَ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda, berikan pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya” (HR.Ibnu Majah No. 938.)<sup>15</sup>

إِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. melakukan hijamah (berbekam) dan memberikan orang yang melakukan upah atas kerjanya” (HR. Bukhari No. 2103)<sup>16</sup>

## c. Ijma

Landasan *ijma* merupakan kesepakatan para ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in dan imam empat sepakat di syariatkannya *ijarah*. Tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak di anggap.<sup>17</sup> Ibnu Qudamah rahimullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi, mulai dari ulama klasik hingga ulama

<sup>15</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 436

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari 1*, (Jakarta: Almahira, 2011), h. 506

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, Kamaluddin A Marzuki, *Fikih Sunnah*, Cet 7, (Bandung: Alma 'arif, 1997), h.18

kontemporer sepakat dibolehkannya *ijarah*.<sup>18</sup> Abu Bakar Al-Asham, Ismail Bin Ulyah, Al-Bashri, Al-Qasyani, Al-Nahrawan, dan Ibnu Kisan mengatakan karena manusia membutuhkan manfaat sebagaimana membutuhkan benda dengan menggunakan akad jual beli. Tatkala akad jual beli diperbolehkan, maka wajib diperbolehkannya akad *ijarah* terhadap manfaat.<sup>19</sup>

#### **d. Fatwa DSN**

Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* merupakan fatwa yang mengatur mengenai *ijarah*. Ketentuannya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### **1) Rukun dan Syarat *Ijarah*:**

- a) Sigat *ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad *ijarah* adalah:
  - (1) Manfaat barang dan sewa
  - (2) Manfaat jasa dan upah.

---

<sup>18</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mahzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h.315-316

<sup>19</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.42

<sup>20</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*...h. 94-96.

## 2) Ketentuan Objek *ijarah*:<sup>21</sup>

- a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau indentifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembayaran manfaat.
- h) Pembayaran sewa atau upah adalah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,



### 3. Rukun Dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara yang menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktira*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat<sup>22</sup>, yaitu:

#### a. Rukun *Ijarah*

##### 1) Dua Orang yang Berakad (*Aqidain*)

Yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, merupakan orang yang melakukan akad *ijarah*. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.<sup>23</sup>

##### 2) Ijab dan Qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Ijab dan qabul sewa-menyewa merupakan pernyataan dalam akad sewa yang diucapkan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas memberikan pernyataan menunjukkan penyerahan suatu manfaat atas suatu barang, misalnya: “Aku sewakan rumah ini kepada mu per-bulan Rp. 500.000,00”. Qabul adalah ucapan dari orang yang menyewa (*musta'jir*) yang dengan jelas menunjukkan kesediaannya menerima manfaat atas suatu

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.

<sup>23</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdulla, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 170.

barang, misalnya “Aku terima sewa rumah tersebut dengan harga demikian perbulan”.<sup>24</sup>

3) Upah atau Imbalan (*Al-Ujrah*)

Yaitu jumlah harga yang akan di berikan atas suatu barang manfaat yang di sewa.

4) Manfaat (ma'qud 'Alaih)

Yaitu objek ijarah. Baik manfaat dari suatu barang uang disewa atau jasa dari orang bekerja.

**b. Syarat ijarah**

1) Syarat Terbentuknya Akad (*Syarth al-In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus dipenuhi agar sewa-menyewa sah dipandang syara.' Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad sewa-menyewa menjadi batal. Menurut Hanafiyah mensyaratkan tiga hal, yaitu syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melakukan akad), akad, dan objek akad.<sup>25</sup>

a) Syarat *Aqid* (orang yang melakukan akad)

*Aqid* harus berakal dan *mumayiz*, yang artinya para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> *Ibid.*,

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 394.

<sup>26</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, h.132.

b) Syarat Akad (Ijab dan Qabul)

*Shigat* yang terdiri dari ijab dan qabul pada akad *ijarah* bisa menggunakan setiap *lafazd* yang menunjukan transaksi sewa-menyewa baik dengan lisan, tulisan ataupun dengan sarana modern<sup>27</sup>. Perlu dipahami dari kitab-kitab Mazhab Syafi'iyah, bahwa transaksi *ijarah* boleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya (*mu'atah*) jika sudah kebiasaan, hal itu tidak diperbolehkan.<sup>28</sup>

c) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Pertama, manfaat yang di sewakan adalah yang dibolehkan secara *syara'*. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* menjelaskan bahwa manfaat yang dijadikan objek *ijarah* harus dibolehkan oleh *syara*. Seperti menyewa rumah untuk di tempati, kitab untuk dibaca, dan lain sebagainya. Syarat ini juga menjelaskan bahwa tidak di bolehkan menyewa barang untuk maksiat.<sup>29</sup>

Kedua, objek yang di sewakan dapat di serah terima kan baik manfaat maupun bendanya. Menurut kesepakatan fuqaha, akad *ijarah* tidak dibolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Hal demikian agar orang yang menyewa (*musta'jir*) dapat menikmati manfaatnya. Jika orang yang

---

80. <sup>27</sup> Oni Sahrani, Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.

<sup>28</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah...*, h. 150.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*... h. 396.

menyewakan manfaat (*mu'jir*) tidak sanggup menyerahkan manfaat ( objek yang disewakan), baik secara fisik maupun secara *syar'i*, maka transaksi tidak sah.<sup>30</sup>

Mayoritas ahli-ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa objek akad harus ada pada saat akad ditutup. Ahli hukum Hanafi menegaskan bahwa syarat objek akad diantaranya, yaitu objek akad ada pada saat akad ditutup, sehingga tidak terjadi akad terhadap suatu barang yang tidak ada. Sedangkan dari golongan ahli hukum Syafi'i mengatakan bahwa tidak dibenarkan akad terhadap objek yang tidak ada, seperti buah yang belum jadi, hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW. Tentang *gharar* sebagaimana yang telah dikemukakan diatas.<sup>31</sup>

## 2) Syarat Sahnya *Ijarah* (*Syarth ash-Shihah*)

Untuk syarat sahnya *Ijarah* maka harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad (*aqid*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), dan upah atau imbalan (*ujrah*). Dengan demikian syarat-syarat sahnya *ijarah* adalah sebagai berikut:

a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang melakukan akad.

<sup>30</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi...*, h. 714.

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 194-196.

Dalam hal ini harus ada keridhaan atau kerelaan antara penyewa dan pemilik sewa dalam melakukan akad. Jika salah satu pihak ada yang tidak rela dan dipaksa untuk melakukan akad ijarah, maka tidak sah.<sup>32</sup> Syarat ini di terapkan juga sebagaimana dalam akad jual beli.

- b) Hendaknya objek akad diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Kejelasan dalam objek akad adalah dengan cara mengetahui kejelasan sifat-sifatnya, kemudian menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang di harapkan jika merupakan *ijarah* atas suatu pekerjaan.<sup>33</sup>

- c) Hendaknya objek akad dapat di serahkan baik secara hakiki maupun syara'.

Jumhur Ulama sepakat bahwa tidak boleh melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki), misalnya menyewakan binatang yang lepas dari kandang, dan secara *syara'*, misalnya menyewakan seorang yang sedang haid untuk membersihkan masjid.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., h. 19.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 395



d) Manfaat objek *ijarah* dibolehkan secara *syara*.

Yaitu tidak boleh menyewa suatu manfaat untuk suatu maksiat, seperti menyewakan manfaat atas suatu barang atau menyewa seseorang atas suatu pekerjaan yang di larang oleh agama. Seperti, seseorang yang menyewa seorang untuk membunuh, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual minuman keras atau untuk di jadikan tempat bermain judi, maka akan menjadi fasid. Karena semua itu di haramkan dan termasuk ke dalam kategori memakan uang manusia dengan batil.<sup>35</sup>

3) Syarat Berlakunya Akad (*Syrath an-Nafaadz*)

Untuk berlakunya (*nafaadz*), akad *ijarah* disyaratkan yaitu diantaranya harus telah memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk bertindak hukum dan memiliki kekuasaan atau hak milik atas suatu barang yang di sewakan (*al-wilaayah*) untuk melaksanakan perbuatan hukum.<sup>36</sup> Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak ada kepemilikan atau hak kuasa, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 20-21.

<sup>36</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h.

persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.<sup>37</sup>

#### **4. Macam – Macam Ijarah**

*Ijarah* di kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

##### **a. *Ijarah 'ala al-Manafi***

*Ijarah 'ala al-Manafi* atau yang biasa disebut dengan sewa-menyewa merupakan *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat atas suatu, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, motor untuk dikendarai.<sup>38</sup>

##### **b. *Ijarah 'al-amal Ijarah***

*Ijarah 'al-amal* yang biasa disebut dengan upah-mengupah merupakan *ijarah* yang objeknya adalah amal atau pekerjaan dari seseorang. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam menjelaskan bahwa *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. *Ijarah* jenis ini di perbolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, dan lain-lain.

Orang yang disewa (*ajr*) ada dua macam, yaitu pekerja khusus (*ajr khash*) dan pekerja umum (*ajir musytarak*). Pekerja khusus merupakan pekerja yang bekerja hanya pada satu orang.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 322.

<sup>38</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 85.

Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk banyak orang, pekerja umum boleh bekerja kepada orang lain juga, tetapi pekerja khusus tidak boleh.<sup>39</sup>

## 5. Berakhirnya *Ijarah*

*Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat ulama Hanafi. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad *ijarah*, dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, dimana mustajir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris. Jika penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karena kematian orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Atau sewa-menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan mengosongkan barang sewa. Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah dalam jangka maksimal enam bulan semenjak kematian orang yang menyewa<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

<sup>40</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuh*..., h. 652

- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Islam) akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin diteruskan.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada uzur. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bias dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.
- 5) Pembatalan sepihak dari aqid apabila ada kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam

keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.<sup>41</sup>

## **B. Bisnis Jasa Layanan Ojek Kopi**

### **1. Perkembangan Bisnis Jasa Layanan Transportasi**

Pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya di gunakan sebagai kendaraan termasuk perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan ditengah gurun menjadi nilai yang positif dari hewan tersebut. Meskipun demikian hewan tersebut tidak bisa berlari kencang seperti kuda. Namun, pada saat itu, alat transportasi utama antar kota dan kampung adalah kuda, unta, dan kereta kuda. Dalam hal tersebut, binatang-binatang tunggangan serta alat pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang di ciptakan Allah untuk manusia agar dapat mereka kendarai.

Pada saat ini kemajuan teknologi pada saat ini menjadikan alat transportasi yang lebih canggih pula, seperti motor, mobil, kereta api, bahkan pesawat terbang. Perjalanan yang semula ditempuh berhari-hari dengan berjalan kaki, sekarang bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dari kecanggihan teknologi ini muncul ide untuk melakukan kegiatan muamalah berupa pelayanan jasa transportasi.

Jasa Transportasi merupakan suatu jasa yang bergerak untuk melakukan pertukaran orang maupun benda yang saling menguntungkan

---

<sup>41</sup> Tim PrimaPena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gitamedia Press 2015), h.

atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai *the buying and selling of goods services*. Sedangkan perusahaan bisnis adalah suatu organisasi yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, atau uang untuk menghasilkan keuntungan. Salah satu bentuk dari jasa transportasi ialah Jasa layanan Transportasi Ojek kopi merupakan transportasi yang sama halnya dengan angkutan umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan. Namun transportasi ojek kopi dapat dikatakan lebih inovatif, karena dengan memodifikasikan kendaraan.

## **2. Unsur-Unsur yang terkait dalam Jasa Layanan Transportasi Ojek Kopi**

### **a. Bentuk Kepemilikan Bisnis:**

#### **Perusahaan Perorangan (PO)**

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau pengusaha individu atau perorangan. Kebebasan untuk mendirikan usaha perseorangan memungkinkan siapa saja untuk mendirikan badan usaha sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Merujuk pada pengertian perusahaan perseorangan, dalam skala besar badan usaha ini umumnya berbentuk badan usaha milik swasta (BUMS) sedangkan dalam skala yang lebih kecil disebut UKM (Usaha Kecil Menengah) atau Small Medium Enterprise (SME). Meskipun badan usaha tersebut adalah milik perseorangan, namun dari segi permodalan tetap bergantung pada instansi atau bisnis lain.



Terdapat 2 jenis usaha perseorang pertama, yaitu jenis usaha perseorangan perdagangan. Jenis usaha perdagangan ini merupakan jenis usaha kecil hingga menengah, seperti warung nasi, toko kelontong, pedagang kaki lima, toko online, dan masih banyak lagi. Kedua, jenis usaha perseorangan, jenis usaha perseorangan yang adalah usaha dalam bentuk jasa. Di era modern ini, semakin banyak orang yang menggunakan jasa orang lain. Sehingga bidang usaha jasa sangat banyak diminati, dan bisa dikelola oleh perseorangan, tanpa harus mendirikan kantor. Badan usaha perseorang jenis jasa ini seperti jasa desain, jasa menulis, jasa pijat, usaha salon, usaha bengkel dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut, bentuk kepemilikan bisnis jasa layanan transportasi pada ojek kopi termasuk ke dalam perusahaan perserorang jasa.<sup>43</sup>

#### b. Elemen Manusia

Elemen manusia merupakan inti dari bisnis. Bisnis membutuhkan orang sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Manusia diperlukan dalam bisnis untuk memproduksi barang dan jasa serta menciptakan pekerjaan. Pemilik adalah orang yang memiliki bisnis, yang menanamkan uangnya dalam bisnis tertentu dan juga menjalankannya karena mereka mengharapkan adanya pendapatan dalam bentuk keuntungan dari bisnis tersebut.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Hasnil Basri, *Hukum Pengangkutan* (Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, 2002), h.22-27

<sup>44</sup> Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 10

Manajer adalah orang yang menjalankan bisnis tersebut dan bertanggung jawab terhadap pemilik bisnis atau perusahaan. Manajer yang diperkerjakan oleh seorang pemilik perusahaan berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan melalui orang lain.

Pekerja (karyawan atau pegawai) menawarkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa dan juga untuk menghasilkan keuntungan. Dari keterampilan dan kemampuan yang diberikannya, para pekerja mengharapkan menerima upah atau gaji yang berangsur-angsur meningkat jumlah. Dalam bisnis jasa layanan transportasi ojek kopi ini, mengganti istilah pekerja dengan pengendara.<sup>45</sup>

Konsumen adalah seseorang atau suatu bisnis yang membeli barang atau jasa untuk digunakan secara pribadi atau organisasi. Konsumen selalu menginginkan produk atau jasa yang terbaik, membeli produk yang dibelinya dapat diandalkan. Sedangkan dalam bisnis jasa layanan transportasi ojek kopi, yang berpihak sebagai konsumen adalah agen kopi dan pemilik kopi.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> *Ibid.*,

### 3. Pelaksanaan Kegiatan Ojek Kopi

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya harus meliputi beberapa hal yang harus diterapkan dalam pelaksana kegiatan ojek kopi (ojek motor) antara lain:<sup>47</sup>

- a. Kerjasama yang dilakukan antara pengendara dengan pemilik kopi dilakukan melalui perjanjian kerjasama pengendara dalam menjalani pekerjaannya, membawa transportasi (motor) sendiri sebagai alat kerja.
- b. Kelengkapan kerja seperti rantai ban yang sudah dimodifikasi, sepatu boot, dan perlengkapan lainnya sebelum mengawali pekerjaan.
- c. Pembayaran hasil dari jasa ojek kopi dibayar oleh pemilik kopi. Agen ojek kopi setiap satu kali angkut barang (kopi) sesuai dengan perkilo barang yang diangkutnya.
- d. Dalam mekanismenya, pengendara dengan motornya sendiri, yaitu mengumpulkan barang dari lahan pertanian, menggunakan tarif yang sudah ditentukan. Dalam penentuan harga jasa layanan ojek kopi ini, telah menentukan tarif sendiri jika barang yang diambil dari lahan sendiri.

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko, Ojek Kopi Di Desa Purawiwitan, Pada Tanggal 20 Agustus 2020

## C. Ganti Rugi

### 1. Pengertian Ganti Rugi

Kompensasi atau ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul karena gagal bayar sebagai akibat dari kesepakatan atau mungkin timbul karena tindakan ilegal. Kompensasi yang timbul dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, maka menurut undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban, jika pihak lain dalam perjanjian mengalami kerugian karenanya.<sup>48</sup> Secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan. Kerugian adalah selisih yang merugikan antara keadaan yang timbul sebagai akibat dari norma, dan situasi yang sekiranya akan timbul jika norma tersebut tidak terjadi, sehingga dapat ditarik mengenai kerugian adalah situasi. Pengurangan kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan baik melalui perjanjian atau melalui undang-undang dikarenakan pihak lain.

Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma wanprestasi) dengan

---

<sup>48</sup> Moegini Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 1979), h.

situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma wanprestasi).<sup>49</sup>

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, berdasarkan pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yakni kewajiban penyewa untuk mengganti kerugian persewaan akibat kelalaian pihak penyewa melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

- (1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
- (2) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik persewaan akibat kelalaian penyewa.
- (3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan dapat dinikmatinya.

Di dalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita persewaan dalam bentuk uang, kekayaan, dan benda. Sedangkan kerugian immaterial adalah suatu kerugian yang diderita oleh persewaan yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat, rasa kecewa, dan lain-lain.

Sedangkan konsep kerugian dalam Islam menurut Syamsul Anwar, lebih menitik beratkan pada hak dan kewajiban antara debitur

---

<sup>49</sup> Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 263.

dan kreditur menurutnya, santunan dalam Islam hanya dibebankan oleh debitur jika kreditur dirugikan oleh debitur sebagai akibat dari tidak melaksanakan tanggung jawab atau mengingkari janji. Kompensasi hanya dibebankan kepada debitur yang mengingkari janjinya jika kerugian yang diderita kreditor memiliki hubungan dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar kontrak dengan debitor.<sup>50</sup>

## 2. Dasar Hukum Ganti Rugi

### a. AL-Qur'an

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”(Q.S Yusuf [12]: 72)

### b. Hadis

لَا ضَرَّ رَرٍ وَلَا ضَرَّ رَارٍ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”(HR Ibnu Majah dan Ahmad).<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2010) h. 49

<sup>51</sup> Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ganti Rugi (ta'wid)*.



## الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ وَالزَّيْمُ غَارِمٌ

Artinya: “Pinjaman hendaknya dikembalikan dan orang yang menanggung hendaknya membayar” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>52</sup>

### 3. Sebab- Sebab Ganti Rugi

Dari pengertian kerugian diatas dapat kita lihat bahwa kerugian adalah berkurangnya harta, dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Syarat untuk menggeser kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut.

Dalam hukum Islam ada dua faktor yang menyebabkan ganti rugi, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alfa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaanya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh syara. Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan

---

<sup>52</sup> Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husini, *Kifayat Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 200

kewajiban.<sup>53</sup>

#### **4. Rukun Ganti Rugi**

##### **a. Orang Yang Menjamin**

Syarat orang yang menjamin harus orang yang berakal, *baligh*, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian, anak-anak, orang gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin.<sup>54</sup>

##### **b. Orang Yang Berpiutang**

Orang yang menerima jaminan syaratnya adalah diketahui oleh penjamin, sebab watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di kemudian hari bagi penjamin.

##### **c. Orang Yang Berhutang**

Orang yang berhutang tidak disyaratkan baginya, kerelaan terhadap penjamin karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang, rela maupun tidak. Namun lebih baik dia rela.

##### **d. Objek Jaminan Hutang Berupa Uang Atau Barang**

Objek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaan diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu tidak sah *dhaman* (jaminan),

---

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 262-263

jika objek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada *gharar* atau ketidakpastiaan.

**e. *Sighat***

Pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna jaminan. *Sighat* hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, *dhaman* adalah pernyataan sepihak saja.<sup>55</sup>

**5. Sebab-Sebab Ganti Rugi**

Menurut Nurhayati Abas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab :<sup>56</sup>

- a. Harus ada hubungan kausal
- b. Harus ada *Adequate* Kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas- batas yang patut. Jika kreditur tidak berusaha membatasi kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibebankan kepada debitur. Ketentuan ini juga berkaitan dengan prinsip dapat digugat dan hubungan *Adequate*.

**6. Wujud Ganti Rugi**

Pada umumnya ganti rugi di perhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Menurut Pitlo, Undang- undang tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu<sup>57</sup>. Alasan yang sebenarnya

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 263

<sup>56</sup> Isnaini Harahap, *Hadis-Hadis Ekonmi*, (Jakarta: Prenada Media, 2015)., h. 189

<sup>57</sup> Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : Alumni, 1999), h.

adalah bahwa berpegang pada prinsip itu banyak kesulitan- kesulitan yang dapat dihindarkan. Walaupun demikian hal itu tidak berarti bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggaranannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti terdapat pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”<sup>58</sup>

## 7. Konsep Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Pengertian *dhaman* dalam khazanah hukum Islam cukup bervariasi, bahwa kata *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa *dhaman* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah mengutip dari Asmuni adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan keharta bendaan, fisik maupun

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,

perasaan seperti nama baik.<sup>59</sup> Menurut Asmuni dalam tulisannya, teori ganti rugi (*Dhaman*) Perspektif Hukum Islam, menyebutkan secara jelas bahwasannya ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah diebutkan oleh nash Al-Qur'an maupun hadist Nabi. Dari nash-nash tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan *dhaman* atau ganti rugi, sejak awal para fuqaha tidak menggunakan istilah *masuliyah madaniyah* sebagai sebutan tanggungan perdata, dan juga *masuliyah al-jina'iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana.<sup>60</sup>

Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah *al-jawabir* untuk sebutan ganti rugi perdata, dan *al-jawazir* untuk sebutan ganti rugi pidana. Walaupun dalam perkembangannya kemudian para fuqaha sering menggunakan istilah *masuliyah* dan tidak lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum barat. *Dhaman* dapat terjadi karena penyimpangan terhadap akad yang disebut *dhaman al-aqdi*, dan dapat pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut *dhamanudwan*. Di dalam penetapan ganti rugi, unsur-unsur yang paling penting adalah *dharar* atau kerugian pada korban. *Dharar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan pada moral dan perasaan atau disebut dengan *dharar adabi* termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan *dharar* yang di

---

<sup>59</sup> A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 120-123

<sup>60</sup> *Ibid.*,

derita oleh korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.<sup>61</sup>

Sedangkan menurut Syamsul Anwar, konsep ganti rugi lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan pihak debitur. Menurutnya ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak kreditur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan oleh debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur.

Dalam sebuah terdapat tiga unsur pokok, yaitu: Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan, yang kedua adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi para kreditor, dan yang terakhir adanya kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dalam konsep ganti rugi dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Daman akad (*daman al''akd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. Daman udwan (*daman al''udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*,



yang merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>62</sup>

Jika diuraikan secara lengkap, pengertian di atas memberikan cakupan yang cukup luas dalam hukum perikatan Islam. Sebagaimana diuraikan oleh Asmuni Mth dalam tulisannya bahwa definisi *dhaman* akan mencakup makna-makna sebagai berikut.<sup>63</sup>

- a. Obyek wajib *dhaman* terletak pada zimmah (perjanjian) kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengadukan penyebab kerugian (*mutasabbib*) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, syar'i hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan khitab *al-targib* yang meliputi *makruh* dan *mandubat*. *Zhimmah* menurut bahasa adalah *al-ahdu* (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha zimmah adalah sesuatu yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. *Ahlu zimmah* adalah mereka yang melakukan perjanjian dimana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban.

---

<sup>62</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 330

<sup>63</sup> A. Rahmad Asmuni, *Ilmu Fiqh 3*...h. 125

- b. Kewajiban atas dasar *dhaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Dhaman* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu sedangkan *uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *dhaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi kerugian pada korban. Sedangkan *uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi.<sup>64</sup>
- c. Sebab-sebab *dhaman* adalah adanya unsur *taaddi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang seharusnya dipenuhi. *Ta'adi* juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (*mukhalafatu ahkam* syariah) seperti pada kasus perusakan barang (*al-itlaf*), perampasan (*al-ghasb*), maupun kelalaian atau penyalahgunaan barang secara sengaja (*al-ihmal*).
- d. *Ta'adi* mewajibkan *dhamman* benar-benar menimbulkan *dharar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhaman*, karena secara faktual tidak ada *dharar* yang harus diganti rugi.
- e. Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *dharar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya *dharar* dapat dinisbatkan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 126

kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika *dharar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku sendiri, maka *dhaman* tidak dapat diberlakukan karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.<sup>65</sup>

- f. *Dharar* harus bersifat umum sesuai dengan keumuman, tingkat *dharar* diukur berdasarkan *urf* (kebiasaaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushl: *yajibu hamlu al-lafdzi ala ma''nahu al-muhadadad fi asy-syar''i in wijida, wa illa wjaba hamluhu ala ma''nahu al-urfi* (sesuatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang *definitive* secara syara jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna *definitve* berdasarkan *urf*. Karena syar''i tidak menetapkan makna *dharar*, sehingga ukurannya baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada *urf*. *Dharar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartabendaan jika selaras dengan *urf* yang berlaku ditengah masyarakat.
- g. Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *dharar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *dhaman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat

---

<sup>65</sup> Ibid., h. 127

pelakunya gara menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.<sup>66</sup>

Ganti rugi (*ta''wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta''wid*) adalah sesuai dengan nilai kerugian yang nyata (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai''ah*). Ganti rugi *ta''wid* hanya boleh dikenakan dalam transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, *istishna* serta *murabahah* dan *ijarah*.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> Nonics.com, *Ganti Rugi Ta'wid*, (Online) tersedia di: <http://www.Syariahnonics.net/gantirugi-ta'wid.html>.

## 8. Ketentuan Ganti Rugi Menurut Fatwa MUI

Ketentuan ganti rugi menurut fatwa DSN – MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.<sup>68</sup>

### a. Ketentuan umum

- 1) Ganti rugi (*ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wid* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- 4) Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i' ah*).
- 5) Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan *ijarah*

---

<sup>68</sup> Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004....

b. Ketentuan khusus

- 1) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 2) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.<sup>69</sup>

## 9. Pengecualian Ganti Rugi

Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat membebaskan seseorang dari ganti rugi, diantaranya yaitu:<sup>70</sup>

- a. Mencedakai yang menyakiti dalam keadaan darurat. Maka berlaku kaedah keadaan darurat membolehkan suatu yang diharamkan, contohnya pada keadaan seseorang hendak dibegal, dan korban melakukan pembelaan diri, sehingga menyebabkan pembegal meninggal, maka korban tidak diwajibkan mengganti rugi.
- b. Diizinkan oleh yang memiliki. Misalkan yang punya barang mengizinkan untuk memanfaatkannya. Makanan dipersilakan untuk dihabiskan, begitu pula minuman, maka minuman tersebut tidak perlu diganti rugi.<sup>71</sup>
- c. Diizinkan untuk memanfaatkan dari syariat, maka tidak ada *dhaman* (ganti rugi kerusakan). Misalnya, ada yang darurat butuh makan dan ia tidak memiliki makanan. Syariat membolehkan memakan makanan orang lain kala kondisi darurat seperti ini, ia tidak dikenai *dhaman* (ganti rugi). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

<sup>69</sup> *Ibid.*,

<sup>70</sup> Rumaysho, *Merusak Tetapi Tidak Perlu Ganti Rugi*, (Online) tersedia di: <https://rumaysho.com/24265-kaedah-fikih-26-merusak-tetapi-tidak-perlu-ganti-rugi.html>

<sup>71</sup> *Ibid.*,



rahimahullah menyatakan, “Tidaklah masalah seseorang makan harta orang lain dalam keadaan terpaksa karena fakir, dan tidak perlu ada *dhaman* (ganti rugi).”<sup>72</sup>

- d. Pengerusakan terjadi di tangan orang yang Al-amin. Al-amin adalah setiap orang yang diizinkan memegang suatu harta dengan izin syari atau izin si pemilik, seperti diizinkan karena sudah menyewa, orang yang meminjam (*'aariyah*), orang yang diminta dititipkan barang (*wadi'ah*), yang saling berserikat, yang diwasiatkan menjaga harta anak yatim, nazhir wakaf, wali dari orang safih, dan semacamnya. Jika terjadi kerusakan barang di tangan orang-orang yang disebutkan di sini selama tidak sengaja dan bukan karena berlebihan, maka tidak ada ganti rugi.<sup>73</sup>
- e. Ada yang ingin berbuat baik pada orang lain, lantas dirusak oleh orang lain selama tidak berlebihan. Misalnya, ada yang meletakkan batu atau kayu pada jalan yang berbecek kala hujan, supaya orang-orang yang lewat tidak terjatuh di situ. Namun ada yang jatuh kala melewati jalan tersebut, maka tidak ada *dhaman*, karena orang ini dianggap muhsin, kecuali kalau yang meletakkan batu atau kayu pada jalan melampaui aturan yang wajar.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*,

<sup>74</sup> *Ibid.*,

## D. Tanggung Jawab

### 1. Pengertian Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bertanggung jawab memiliki arti berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen.<sup>75</sup>

Dalam Islam, tanggung di kenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang di lakukan atau di belanjakan karena mereka akan di periksa dan di persoalkan bukan sekedar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni:

- a. Tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*).
- b. Tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*).
- c. Tanggung jawab dengan pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain

---

<sup>75</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h.59

memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu di tempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanggung yang bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti di bebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat di lihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.<sup>76</sup>

## **2. Nilai Karakter Tanggung Jawab**

### **a. Pengertian Nilai karakter tanggung jawab**

Nilai adalah prinsip-prinsip sosial, tujuan-tujuan, standar-standar yang dipakai atau diterima oleh individu, kelas, masyarakat, dan lain-lain. Nilai erat kaitannya dengan keyakinan seseorang, baik secara personal maupun secara sosial. Nilai tersebut sangat erat dengan pengertian-pengertian dan aktifitas manusia kompleks sehingga sulit ditentukan batasannya. Nilai dirasakan dalam diri masing-masing individu sebagai pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam hidup.<sup>77</sup> Pada umumnya nilai erat berkaitannya dengan kepercayaan, sikap atau perasaan yang

---

<sup>76</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.78.

<sup>77</sup> Agus Zaenul, Fitri, *Reinventing Human Character: Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika Sekolah*....h.89.

dibanggakan individu, dipegang teguh dan dipilih karena dilakukan terus menerus tanpa adanya paksaan dan menjadi acuan dalam kehidupan setiap individu. Misalnya acuan dalam membuat keputusan, melakukan tindakan kepada orang lain dan berbagai aktifitas lain yang semuanya menunjukkan identitas diri seseorang.<sup>78</sup>

Karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah watak, tabiat, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari *internalisasi* berbagai kebajikan yang di yakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik. Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa karakter adalah akhlak ataupun watak yang berpusat pada diri seseorang sebagai landasan dalam berpikir, bertindak, dan bersikap.

Nilai karakter merupakan pedoman yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan tersebut dapat mencirikan baik buruknya karakter seseorang. Tanggung jawab merupakan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 90.

nilai moral penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab sudah menjadi kodrat manusia, yang artinya sudah menjadi bagian hidup manusia. Tanggung jawab juga dikatakan dalam Al-Quran, yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”(QS. Al-Muddassir:38)

Ayat diatas menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan seseorang pasti memerlukan pertanggung jawaban. Dengan demikian apapun keputusan yang dibuat harus memiliki pertimbangan yang mendalam karena kedepannya akan di pertanggung jawabkan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai karakter tanggung jawab ialah sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan pada nilai yang berlaku di masyarakat.

#### **b. Indikator Nilai Karakter Tanggung Jawab**

Indikator nilai karakter tanggung jawab menurut Nurul Zuriyah dalam bukunya ada tiga, yaitu:

- 1) Menyerah tugas tepat waktu.
- 2) Mengerjakan sesuai petunjuk
- 3) Mengerjakan tugas berdasarkan hasil karya sendiri.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif perubahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 232.

Agus Zaenal Fitri dalam bukunya juga mengemukakan beberapa indikator nilai karakter tanggung jawab, yaitu:

- 1) Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik
- 2) Bertanggung jawab atas setiap perbuatan
- 3) Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah di teapkan
- 4) Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama.

Berdasarkan indikator-indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab dapat ditunjukkan dalam setiap perbuatan dimana saja dan kapan saja.<sup>80</sup>

### 3. Macam-Macam Tanggung Jawab

Setiap orang memiliki sikap tanggung jawab terhadap setiap tindakan yang telah di lakukannya, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seseorang harus memiliki tanggung jawab baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Terdapat klasifikasi mengenai macam-macam tanggung jawab antara lain:<sup>81</sup>

#### a. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri

Tanggung terhadap diri sendiri menuntut adanya kesadaran dari setiap orang agar memenuhi kewajibannya dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Setiap peserta didik harus memiliki kesadaran dalam setiap perbuatan dan perkataan yang dilakukannya. Tanggung jawab terhadap diri

---

<sup>80</sup> Agus Zaenal Fitri, *Reinventing Human Character: Pendidikan karakter berbasis nilai & etika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 43.

<sup>81</sup> Brainly, *Macam-macam Tanggung Jawab*, (Online) tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/31461026>

sendiri tersebut harus tumbuh dalam setiap peserta didik karena sebagai dasar sebelum ia bertanggung jawab terhadap yang lainnya.

b. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga

Setiap anggota keluarga harus bertanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga, selain itu tanggung jawab merupakan kesejahteraan, keselamatan dan kehidupan. Rasa tanggung jawab terhadap keluarga inipun perlu ditumbuhkan sejak usia dini dengan cara keteladanan anggota keluarga yang lebih dewasa, bimbingan serta pengawas dari anggota keluarga sehingga tumbuh dalam benak mereka semangat tanggung menjaga nama baik keluarga.<sup>82</sup>

c. Tanggung Terhadap Masyarakat

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu manusia memiliki tanggung jawab di dalam masyarakat, sehingga perbuatannya itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

d. Tanggung Kepada Bangsa dan Negara

Manusia merupakan warga negara dari suatu negara tertentu, sehingga dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan-aturan,

---

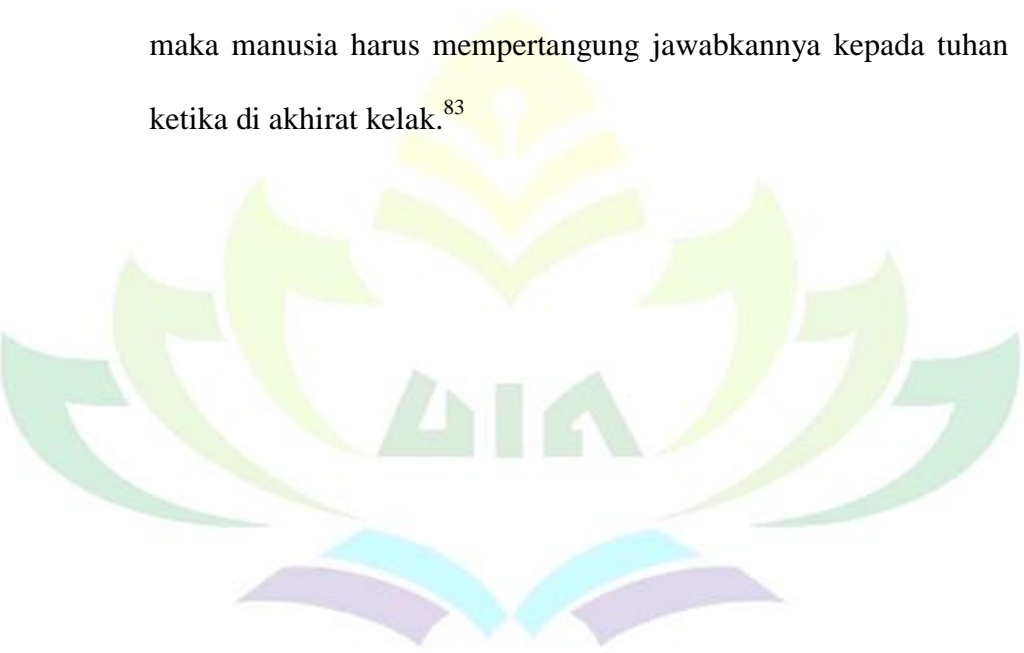
<sup>82</sup> *Ibid.*,



norma-norma maupun ukuran-ukuran yang ada dalam negara tersebut.

e. Tanggung Jawab Terhadap Tuhan

Manusia memiliki tanggung jawab sendiri kepada tuhan sebagai hubungan antara hamba dengan penciptanya. Tanggung jawab tersebut dapat berupa menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Apabila manusia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap segala perintah-perintah tuhan maka manusia harus mempertanggung jawabkannya kepada tuhan ketika di akhirat kelak.<sup>83</sup>



---

<sup>83</sup> *Ibid.*,

## E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Ilham Abdi Prawira. Universitas Negeri Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Karena Wanprestasi (Studi Kritis Atas Pasal 1243-1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)” Penelitian ini membahas tentang Pasal 1243-1252 KUH Perdata yang mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, dalam pasal-pasal tersebut kerugian yang wajib diganti berupa penggantian biaya (*konsten*), rugi (*schade*) dan bunga (*interesten*).

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum Islam terutama mengenai ganti rugi bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka (studi pustaka). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan dari sudut pandang hukum Islam mengenai ganti rugi karena wanprestasi menurut KUH Perdata kemudian dikaji dan dianalisis secara sistematis.

Berdasarkan penelitian ini, dengan mempertimbangkan kepada nas-nas, beberapa pendapat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), penyusun mendapat kesimpulan bahwa,

kerugian yang timbul karena wanprestasi wajib diberikan penggantianannya oleh debitur yang telah melakukan cedera janji (wanprestasi). Kerugian yang harus diganti adalah kerugian yang nyata telah dibuat oleh kreditur yang termasuk biaya (konsten) dan rugi (*schade*), sedangkan bunga (*interesten*) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti rugi karena ke tidak jelasan ke untungan yang diharapkan sehingga mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Perbedaan permasalahan antara skripsi ini dan penulis adalah kerugian yang ditimbulkan jika pada skripsi ini kerugian sengaja ditimbulkan oleh kreditur, sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis kerugian yang ditimbulkan merupakan hal yang tidak disengaja, tempat penelitian, serta objek dalam penelitian ini.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Rohmah Fuziah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (2017) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Atas Kesalahan dan Kelalaian Mudarib dalam Akad Pembiayaan Mudarabah (Study Pada Fatwa Dsn No/07/Dsn/Mui/2000).

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang ganti rugi atas kesalahan dan kelalaian mudarib dalam akad pembiayaan mudarabah dan untuk mengetahui kriteria kesalahan dan kelalaian dalam akad pembiayaan mudarabah yang termasuk dalam Fatwa DSN No.07/DSN/MUI/2000.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan suatu pendekatan *Content Analysis* (analisis isi). Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Pandangan hukum Islam tentang ganti rugi atas kesalahan dan kelalaian dalam akad pembiayaan mudarabah adalah boleh, apabila kerugian benar-benar diakibatkan karakter buruk mudarib, misalnya karena mudarib melakukan kesalahan dan lalai dalam melaksanakan kesepakatan kontrak mudarabah, maka mudarib yang menanggung kerugian. Unsur kesalahan dan kelalaian dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 merujuk pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yakni kesalahan sebagai wujud perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), dan kelalai sebagai wujud wanprestasi (ingkar janji) (Pasal 1234 KUH Perdata). Perbedaan permasalahan antara skripsi ini dan penulis adalah kerugian yang ditimbulkan jika pada skripsi ini kerugian sengaja ditimbulkan oleh mudarib dalam akad pembiayaan, sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis kerugian yang ditimbulkan merupakan hal yang tidak disengaja, tempat penelitian. serta objek dalam penelitian ini.

3. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Aprilia Noviyanti. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019) yang berjudul “Ganti Rugi Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana interpretasi para ahli terhadap konsep ganti

rugi dalam KUH Perdata dan bagaimana konsep ganti rugi dalam KUH Perdata perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif. Teknik pengumpulan bahan hukum meliputi studi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum *skunder*, bahan hukum *tersier*. Untuk teknik analisis bahan hukum data diolah dengan tahap *editing*, *classyfing*, *veryfing* dan *concluding*.

4. Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa interpretasi para ahli tentang konsep ganti Rugi dalam KUH Perdata terdiri dari Biaya, Kerugian, dan Bunga. Sedangkan, ganti rugi dalam KUH Perdata bertentangan dengan fatwa DSN MUI karena besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan diawal perjanjian. Dan ganti rugi dalam KUH Perdata bertentangan dengan KHES karena terdapat bunga yang termasuk riba. Perbedaan permasalahan antara skripsi ini dan penulis adalah pada skripsi ini hanya membahas tentang penelitian kepustakaan mengenai pendapat para ahli mengenai KUH Perdata dan bagaimana konsep ganti rugi dalam KUH Perdata perspektif Hukum Islam. Sedangkan skripsi yang diangkat oleh penulis merupakan penelitian lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd.Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mahzab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari 1*, Jakarta: Almahira, 2011
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam )*, Yogyakarta: UII Pres, 2000
- Anoraga Panji, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Study Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1991
- Asmuni A. Rahmad, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Basri Hasnil, *Hukum Pengangkutan Medan: Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU*, 2002.
- Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunann Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014

Djojodirjo Moegini, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradyna Paramita, 1979

Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 *tentang Ganti Rugi (ta'wid) Fiqh Muamalah*, cet. Ke-9, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Harahap Isnaini, *Hadis-Hadis Ekonmi*, Jakarta: Prenada Media, 2015

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet, Ke-2 Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Hasanuddin, Oni Sahroni, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016

Huda Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2012  
*Hukum Perusahaan Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Imam Taqi al-Din Abu Bakr Ibn Muhammad Al-Husini, *Kifayat Al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth

Kaelan, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paradigma, 2005

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2002

Kartono Kartini, *Pengantar Metedologi Riset Sosial*, Bandung : Mandar Maju, 1996

M. Ali Hasan, *Berbagi Macaam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persasa, 2004

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Cet-1, Jakarta: Mizan Publika, 2010

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Cet 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017



Sabiq Sayyid , Kamaluddin A Marzuki, *Fikih Sunnah*, Cet 7, Bandung: Alma 'arif, 1997

Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Alumni, 1999

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000 Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet 7, (Bandung Penerbit Alumni, 1979

Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet 5, Jakarta: Lentera Hati, 2006

Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdulla, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2010

Sunan Ibnu Majah, Jakarta: Almahira, 2013

Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syafuddin Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Press 2015

Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Yuda Hernoko Agus, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2010

## **Internet**

Brainly, *Macam-macam Tanggung Jawab*, (Online) tersedia di:  
<https://brainly.co.id/tugas/31461026>  
<https://rumaysho.com/24265-kaedah-fikih-26-merusak-tetapi-tidak-perlu-ganti-rugi.html>  
Nonics.com, *Ganti Rugi Ta'wid*, (Online) tersedia di:  
<http://www.Syariahnonics.net/gantirugi-ta'wid.html>.

## **Wawancara**

Andi, Ojek Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 20 Agustus 2020

Andre, Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 30 Januari 2021

Didik, Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 20 Agustus 2020

Faris, Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 25 Januari 2021

Ifan, Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 25 Januari 2021

Khovita, Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 25 Januari 2021

Kusnadi, Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 20 Agustus 2020

Putri, Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, Tanggal 25 Januari 2021

Rianto, Ojek Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 20 Agustus 2020

Rustam Wawancara Dengan Penulis, Ojek Kopi Di Pekon Purawiwitan, Purawiwitan, 20 Agustus 2020